

## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI 13 KOTA TERNATE

Irsan Habsyi

*Prodi Pendidikan Geografi STKIP Kie Raha Ternate*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang: 1) Proses perencanaan pembiayaan pendidikan pada SMP Negeri 13 Kota Ternate; 2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada SMP Negeri 13 Kota Ternate; 3) Pengawasan pemanfaatan pembiayaan pendidikan pada SMP Negeri 13 Kota Ternate; 4) Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan pada SMP Negeri 13 Kota Ternate. Metode penelitian ini adalah *naturalistic inquiry* dengan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan dan perekaman data dilakukan melalui tahap berikut ini, yaitu: (1) orientasi, (2) eksplorasi, (3) member check. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah peneliti sendiri yang dilengkapi oleh dokumen wawancara, tape recorder, dan catatan lapangan. Dari hasil temuan dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai hasil penelitian yaitu: (1) Kegiatan perencanaan pembiayaan pendidikan tidak lepas dari program-program yang akan dikembangkan di sekolah dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: (a) pengumpulan data yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi daya dukung penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan data yang akurat dari berbagai sumber antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah guru, tenaga administrasi; (b) Penyusunan rencana program didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan; (2) Pembiayaan pendidikan di sekolah ini dilaksanakan untuk membiayai berbagai program yang menjadi prioritas, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua program dan sub program bisa didanai karena alasan kekurangan dana namun menurut para guru dana yang ada sebenarnya cukup tapi kepala sekolah kurang transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah; (3) Pengawasan Pembiayaan Pendidikan dilaksanakan oleh kepala sekolah secara berkala setiap bulan bagi bendahara dan panitia yang ditunjuk untuk mengelola dana, tim monitoring dari sumber dana yang masuk; 4) Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan di laksanakan secara berjenjang yaitu bendahara, atau panitia program ke kepala sekolah dan kepala sekolah ke instansi vertikal di atasnya.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Manajemen, Pembiayaan

### PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka keberhasilan sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikannya akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Namun disadari bahwa dalam melaksanakan upaya tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Seperti permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah umum lainnya, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sekolah saat ini adalah mutu pendidikan masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bermutu tidaknya pendidikan di sekolah tidak lepas dari berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan sekolah. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu aspek yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah. Pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu bagi terlaksananya proses pendidikan yang pada gilirannya berdampak terhadap peningkatan mutu.

Manajemen juga berarti ketrampilan dan kemampuan untuk memperoleh hasil melalui kegiatan bersama orang lain dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jika dikaitkan dengan sekolah, maka manajemen sekolah adalah proses atau kegiatan orang-orang dalam sekolah dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah,

sumber keuangan untuk pembiayaan sekolah, dan sarana serta prasarana yang tersedia untuk tercapainya tujuan sekolah. Untuk itu maka sangat dibutuhkan manajemen berbasis sekolah.

Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen yang diterapkan saat ini, dimana manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan-keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Depdiknas, 2003:20).

SMP Negeri 13 Kota Ternate, merupakan salah satu SMP yang difavoritkan di kota Ternate, terutama di bagian kecamatan Pulau Ternate. Dibalik tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini, namun berdasarkan hasil observasi awal, masih ada berbagai kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya terkait dengan pembiayaan. Sumber-sumber dana yang ada di sekolah ini hanya berasal dari pemerintah pusat berupa dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dari pemerintah kota dalam bentuk dana pendamping BOS, namun dana pendamping BOS dari pemerintah kota Ternate tersendat-sendat dan sering hanya diberikan untuk beberapa bulan saja dalam periode 1 tahun.

Sementara itu sesuai kebijakan pemerintah kota bahwa sekolah tidak diperkenankan untuk memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan harapan pemerintah bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, sekolah dan masyarakat. Dengan sumber dana yang hanya berasal dari pemerintah maka sekolah akan sulit untuk mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan mutu sekolah, terutama untuk membangun dan memperbaiki sarana prasarana sekolah serta pengadaan buku-buku pelajaran dan buku referensi. Dana untuk perbaikan dan pengadaan sarana prasarana juga hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk *block grant* dan dana alokasi khusus (DAK).

Sementara itu tidak tiap tahun sekolah ini mendapatkan bantuan dana *block grant* dan DAK, karena kuota untuk itu terbatas. Untuk bantuan dana *block grant* sekolah mendapat bantuan 2-3 tahun sekali, demikian juga dengan dana DAK. Oleh sebab itu pengadaan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan dan pengadaan buku-buku pelajaran dan buku referensi diambil dari dana BOS dengan tidak menyalahi petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Untuk mengatasi hal ini tentunya kepala sekolah dan semua yang terkait di dalamnya harus mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah ini. Tapi dari hasil observasi, peneliti mendapatkan informasi bahwa dana yang masih kurang ini, tidak dikelola dengan baik dan sebagian tidak disalurkan sesuai apa yang sudah di alokasikan pada rencana kerja dan anggaran sekolah. Contohnya adalah guru-guru mengetahui adanya dana untuk pengembangan kompetensi guru tetapi selama ini, kegiatan pengembangan kompetensi guru sangat jarang dilaksanakan. Hal ini tentu memberi dampak yang kurang baik bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini.

### **Masalah Penelitian**

Pembiayaan pendidikan dilaksanakan untuk membiayai berbagai program pendidikan yang dikembangkan di sekolah ini antara lain program pengembangan Pengembangan proses pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Pengembangan proses pembelajaran dengan model pembelajaran berorientasi pada CTL, Pengembangan pencapaian standar kelulusan yang cerdas, beriman dan bertaqwa, Pengembangan pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan bidangnya, Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan media pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, Pengembangan sistem penilaian yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, tapi semua program yang kami kembangkan tidak bisa dibiayai karena faktor keterbatasan dana, apalagi dana pendamping dari pemerintah kota Ternate, sering tidak di bayar penuh selama 12 bulan dalam waktu satu tahun anggaran.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *naturalistic inquiry*“ dimana data yang dikumpulkan bukan bersifat numerik tetapi bersifat kualitatif dan tidak menggunakan alat ukur penelitian dilakukan dalam situasi yang alami terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian” Gay dan Airissan (2000:10). Moleong (2000:6) mengemukakan: “penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, menganalisis data secara induktif, mengarahkan penelitian pada usaha menemukan teori dasar yang bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh kedua belah pihak, baik peneliti maupun subjek penelitian”.

Moleong (2000:6) mengemukakan: “penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai suatu keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, menganalisis data secara induktif, mengarahkan penelitian pada usaha menemukan teori dasar yang bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Pengembangan proses pembelajaran dengan model pembelajaran berorientasi pada CTL, Pengembangan pencapaian standar kelulusan yang cerdas, beriman dan bertaqwa, Pengembangan pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan bidangnya, Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan media pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, Pengembangan sistem penilaian yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, tapi semua program yang kami kembangkan tidak bisa dibiayai karena faktor keterbatasan dana, apalagi dana pendamping dari pemerintah kota Ternate, sering tidak di bayar penuh selama 12 bulan dalam waktu satu tahun anggaran.

Prosedur yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Nasution (1996:33) yaitu; “(1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap *member check*. Secara lebih rinci tiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap orientasi

Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahapan pertama ini meliputi: (1) Mengamati keadaan SMP Negeri 13 Kota Ternate, (2) Mengidentifikasi dan menentukan permasalahan yang dipandang penting sebagai fokus masalah, (3) Mencari literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Tahap eksplorasi

Untuk melakukan survei/penelitian lapangan pada SMP N 13 Kota Ternate. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi: (1) mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber data yang berkaitan dengan fokus masalah serta melakukan studi dokumentasi; (2) membuat catatan-catatan lapangan; (3) menganalisis catatan-catatan lapangan.

c. Tahap *member check*

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ketiga ini mencakup: (1) menyempurnakan hasil analisis yang dilakukan sejak awal dalam bentuk laporan sementara; (2) menggandakan hasil analisis dan meminta informan untuk memberikan tanggapan balik; (3) mencatat dan menganalisis informasi baru yang diberikan informan, dan; (4) mengadakan perbaikan sesuai dengan koreksi yang ada.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Margono (2003:158) mendefinisikan “observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang tampak pada objek penelitian”. Observasi yang dilakukan adalah:

- a. Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti pada SMP N 13 Kota Ternate terhadap berbagai kegiatan yang ada yang berkaitan dengan fokus penelitian, dalam kegiatan ini peneliti berada bersama objek yang diteliti, (Margono, 2003: 158).
- b. Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki misalnya melalui berbagai sumber seperti bahan-bahan tulisan berupa berbagai dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara yang akan peneliti lakukan adalah wawancara tak terstruktur, dimana wawancara ini dilakukan dalam sikap yang informal. Beberapa hal yang mendorong peneliti untuk melakukan jenis wawancara ini adalah:

1. Peneliti ingin menanyakan sesuatu yang lebih mendalam pada informan.
2. Peneliti melakukan kegiatan yang bersifat *discovery* (penemuan).
3. Peneliti ingin berhubungan secara langsung dengan informan.
4. Peneliti ingin menanyakan sesuatu yang lebih mendalam pada informan.
5. Peneliti melakukan kegiatan yang bersifat *discovery* (penemuan).
6. Peneliti ingin berhubungan secara langsung dengan informan.

## A. Pengertian Manajemen

Terry dan Rue (1997:3) mendefinisikan “manajemen sebagai proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan semua sumber daya, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen tak lepas dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Terry dan Rue, 1997:3).

### a. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal dari pelaksanaan semua fungsi manajemen. Terry & Rue (2001:11) mendefinisikan “perencanaan sebagai suatu kumpulan keputusan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan di masa mendatang.

Menurut Terry (dalam Kambey, 2006:56) pengorganisasian merupakan tindakan pembentukan hubungan tingkah laku antara orang-orang agar mereka dapat bekerjasama secara berdaya guna dan memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu dengan maksud mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

### b. Pelaksanaan

Terry (2001:181) mengatakan bahwa “penggerakan/pelaksanaan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota atau kelompok sedemikian rupa sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok”. Dengan kata lain, menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Siagian (1980:128), mengatakan bahwa “penggerakan adalah keseluruhan pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis”.

### c. Pengawasan

Pengawasan atau pengontrolan, diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas kerja personil dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, Terry dan Rue (1997:9).

## B. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan dan pendanaan memiliki arti dan pengertian yang sama yaitu berasal dari kata biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dan sebagainya) sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004:129) bahwa “pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.

Biaya pendidikan digolongkan dalam 3 Jenis, (PP No 48 Tahun 2008 pasal 3: 229-230) yaitu:

1. Biaya satuan pendidikan.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.
3. Biaya pribadi peserta didik.

Biaya satuan pendidikan, (PP No 48 Tahun 2008) terdiri dari:

1. Biaya investasi, yang terdiri atas:

- a. Biaya investasi lahan pendidikan.
- b. Biaya investasi selain pendidikan.
2. Biaya operasi, yang terdiri atas:
  - a. Biaya personalia.
  - b. Biaya nonpersonalia.
3. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
4. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Manajemen pembiayaan dapat diartikan sebagai “tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian manajemen pembiayaan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah” (Depdiknas. 2002:23)

Di dalam manajemen pembiayaan sekolah terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah.

Untuk itu tujuan manajemen pembiayaan menurut Depdiknas (2002:26) adalah: (a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah; (b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; (c) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran Sekolah.

### C. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan

Sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas. Sumber pendapatan sekolah adalah dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk dana BOS, *block grant*, bantuan sosial dan dana dekonsentrasi ke propinsi, sementara yang berasal dari pemerintah kabupaten dan kota dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dana sharing yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

Sumber dana yang berasal dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung dan iuran komite. Sumber dana dari dunia usaha dan industri dilakukan melalui kerja sama dalam berbagai kegiatan, baik bantuan berupa uang maupun berupa bantuan fasilitas sekolah.

#### a. Model dan Sistem Pembiayaan Pendidikan

Dalam kaitannya dengan biaya pendidikan, Thomas (dalam Mulyono (2010:5) mengungkapkan adanya biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*), serta biaya masyarakat (*social cost*) dan biaya pribadi (*private cost*).1. Biaya Langsung dan Tidak Langsung *Direct cost* (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Biaya langsung terdiri atas biaya pembangunan dan biaya rutin. Biaya

pembangunan ialah biaya yang digunakan untuk pembelian tanah bangunan ruangkelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, serta penggantian dan perbaikan.

Menghitung *unit cost* per siswa menurut Fatah (2006 :26) membagi jumlah biaya yang tersedia dalam program anggaran dengan jumlah kredit yang diambil siswa per tahun dari program tersebut. *Indirectcost* (biaya tidak langsung) adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Temuan

#### 1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Melalui hasil observasi, dokumentasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa SMP N 13 Kota Ternate telah melaksanakan kegiatan perencanaan pembiayaan program pendidikan. Kegiatan perencanaan pembiayaan pendidikan tidak lepas dari program-program yang akan dikembangkan di sekolah dengan melakukan tahapan-tahapan yaitu:

- a. *Pengumpulan data*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi daya dukung penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan data yang akurat dari berbagai sumber antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah dan tenaga administrasi.
- b. *Penyusunan rencana dan program yang akan dilaksanakan*. Kegiatan penyusunan rencana biaya program sekolah dibentuk tim work penyusunan program sekolah yang terdiri dari pimpinan sekolah, perwakilan guru dan tenaga administrasi yang merupakan pengelola kegiatan dan komite sekolah. Penyusunan rencana program didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana program yang telah dibuat kemudian dipaparkan oleh masing-masing pengelola program kemudian dimasukkan kedalam rencana kerja anggaran sekolah. Program-program yang akan dilaksanakan mempertimbangkan aspek-aspek: peningkatan kualitas, modal dasar/starting point, kemampuan pengelola, biaya, waktu, manfaat.

Pengalokasian biaya program pendidikan sesuai dengan program kerjasekolah dalam RKAS, tetapi dalam penyusunan RKAS juga harus mengacu pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS, dana pendamping dan dana *block grant* Pengalokasian biaya program pendidikan sesuai dengan skala prioritas karena keterbatasan dana yang masuk ke sekolah.

#### 2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Dari studi dokumentasi ditemukan program pendidikan yang di biyai di SMP N 13 Kota Ternate. Program-program tersebut yaitu:

- a. Pengembangan proses pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- b. Pengembangan proses pembelajaran dengan model pembelajaran berorientasi pada CTL;
- c. Pengembangan pencapaian standar kelulusan yang cerdas, beriman dan bertaqwa;

- d. Pengembangan pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan bidangnya;
- e. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan media pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Pengembangan manajemen pengelolaan sekolah yang handal;
- g. Pengembangan strategi penggalangan pembiayaan pendidikan yang memadai;
- h. Pengembangan sistem penilaian yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

### **3. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan**

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi ditemukan bahwa kegiatan pengawasan pembiayaan sekolah dilaksanakan oleh: Kepala sekolah secara berkala setiap bulan bagi bendahara dan panitia yang ditunjuk untuk mengelola dana, tim monitoring dari sumber dana yang masuk baik dana BOS, pendamping dan dana block grant, serta dari inspektorat dan BPKP. Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa bendahara tidak memegang seluruh dana untuk pembiayaan pendidikan dari sumber-sumber dana yang masuk karena dana itu sebagian besar dipegang oleh kepala sekolah.

### **4. Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan**

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi ditemukan bahwa pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di laksanakan secara berjenjang yaitu bendahara, atau panitia program ke kepala sekolah dan kepala sekolah ke instansi vertikal di atasnya. Kegiatan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan harus sesuai dengan sumber dana dan peraturan yang berlaku atau petunjuk teknis penggunaan dana.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan**

Perencanaan pembiayaan pendidikan di SMP N 13 Kota Ternate disusun oleh team penyusun yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator tenaga administrasi serta komite sekolah. Program-program tersebut disesuaikan dengan sumber-sumber dana yang ada di sekolah.

- a. Walaupun kegiatan perencanaan program dan pembiayaan melibatkan komunitas sekolah namun masih ditemukan adanya beberapa kelemahan antara lain Fungsi perencanaan dalam manajemen pembiayaan di SMP N 13 Kota Ternate pada kenyataannya belum menggunakan model perencanaan pendidikan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, perencanaan terhadap seluruh proses kegiatan yang berlangsung pada setiap kegiatan masih terpola dengan model umum yang diberikan oleh institusi terkait yaitu Depdiknas.
- b. Dalam perumusan perencanaan program dan pembiayaan, kepala sekolah cenderung tidak melibatkan semua komponen yang terkait dan berkompetensi dalam pengembangan program yang dikelola, kepala sekolah tidak melibatkan perwakilan guru, hanya wakil-wakil kepala sekolah, tenaga administrasi dan pengurus komite sekolah.



- c. Perencanaan pembiayaan pendidikan di SMP N 13 Kota Ternatemasih lebih berorientasi pada peningkatan aspek kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya, sehingga aspek kualitas siswa masih sering terabaikan dan kurang mendapat prioritas karena dana yang dialokasikan hanya sedikit bagi kegiatan kesiswaan
- d. Proses perencanaan pembiayaan pendidikan masih menggunakan pola tradisional, sehingga hasil perencanaan yang dirumuskan cenderung tidak menggambarkan konsep pengembangan jangka panjang, melainkan lebih terfokus pada aktifitas-aktifitas yang bersifat insidental.

## **2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan**

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Pembukuan dana yang masuk dan keluar dilakukan secara cermat dan transparan. Untuk itu tenaga yang melakukan pembukuan dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat.

Penggunaan dana memperhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Asas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, seperti prinsip efisien, pola hidup sederhana, dan sebagainya. Setiap melaksanakan kegiatan yang memberatkan anggaran belanja, ada ikatan-ikatan yang berupa: pembatasan-pembatasan, larangan-larangan, keharusan-keharusan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap petugas yang diberi wewenang dan kewajiban mengelola uang negara.

Ketentuan yang berupa pembatasan dan larangan-larangan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara antara lain: Undang-Undang Perbendaharaan Negara pasal 24, 28,30, yaitu pengeluaran yang melampaui kredit anggaran atau tidak tersedia anggarannya, tidak boleh terjadi. Kredit-kredit yang disediakan dalam anggaran tidak boleh ditambah baik langsung maupun tidak langsung karena adanya keuntungan bagi negara. Barang-barang milik negara berupa apapun tidak boleh diserahkan kepada mereka yang mempunyai tagihan terhadap negara.

## **3. Pengawasan Pembiayaan**

### **a. Pendidikan**

Pada temuan penelitian, telah dinyatakan bahwa berdasarkan analisis hasil observasi dan wawancara secara garis besar permasalahan yang muncul pada aspek pengawasan/pengendalian adalah ketidak jelasan standar yang digunakan dalam mengaplikasikan fungsi pengawasan/pengendalian terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah ini. Dana sebagian dipegang oleh kepala sekolah akan tetapi bendahara dan panitia mampu untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang baik. Hal ini berdampak pada lemahnya fungsi tersebut dalam mewujudkan pemahaman makna dan arti penting landasan nilai-nilai manajerial serta terwujudnya upaya kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi.

Pengawasan merupakan suatu upaya sistematis untuk memberi garansi terhadap pelaksanaan kegiatan atau tugas organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana. Dengan demikian, maka terdapat empat unsur yang berhubungan dengan fungsi pengawasan, yaitu: (1) aktifitas penilaian dan memonitoring, (2) berorientasi pada seluruh aktifitas organisasi, (3) pengawasan dilaksanakan dengan tujuan pokok untuk membuat segenap aktifitas manajemen berjalan sesuai rencana, (4) sistematis, rasional serta sesuai dengan rencana, tujuan dan aturan main organisasi, Pigawahi (dalam Depdiknas, 2007: 49).

#### **b. Pengawasan melekat**

Serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan organisasi atau satuan kerja secara sistemik agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan serta memenuhi asas efisiensi dan efektivitas. Pengendalian secara sistemik didasarkan pada delapan sistem, yaitu : (1) pengorganisasian yang mantap, (2) prosedur yang jelas, (3) kebijakan yang jelas, (4) perencanaan yang matang, (5) sistem pencatatan yang akurat, (6) sistem pelaporan yang tepat, (7) pembinaan personil, dan (8) review internal, Pigawahi (dalam Depdiknas, 2007: 48).

#### **c. Pengawasan fungsional**

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat baik internal pemerintah maupun eksternal pemerintah dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan, memenuhi asas efisiensi dan efektivitas serta tujuan fungsional.

#### **d. Pengawasan masyarakat**

Pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat, disampaikan secara lisan, tulisan, atau bentuk lainnya kepada aparaturnegara berupa sumbangan pikiran, saran perbaikan, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat membangun, atau disampaikan melalui media massa.

Apapun bentuk pengawasan yang dipilih dan dilakukan, seharusnya tetap menggunakan beberapa langkah strategis dalam proses pelaksanaannya yaitu, (1) menetapkan standar kualitas dan metode mengukur prestasi kerja yang jelas, (2) melakukan pengukuran atas prestasi kerja secara baik berdasarkan standar yang ditetapkan, dan (3) memutuskan dan mengambil tindakan korektif dan perbaikan.

### **4. Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan**

- a. Pertanggungjawaban di dalam manajemen pembiayaan berarti penggunaan dana sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan dana secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif

dalam menciptakan pelayanan kepada komunitas pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

- b. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan pembiayaan pendidikan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran dana sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggung jawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah.

Pengelola pembiayaan sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah. Disekolah- sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagian dana pembiayaan . Secara khusus, pengendalian dan pertanggungjawaban pembiayaan sekolah terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan adalah:

1. Dana dibelanjakan sesuai rencana;
2. Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak;
3. Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
4. Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.

Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dan sebagainya. Pengelola pembiayaan sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan.

### SIMPULAN

Kegiatan perencanaan pembiayaan pendidikan tidak lepas dari program-program yang akan dikembangkan di sekolah dengan melakukan tahapan-tahapan yaitu:

1. pengumpulan data yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi daya dukung penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan data yang akurat dari berbagai sumber antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah guru, tenaga administrasi; 2) penyusunan rencana pembiayaan program pendidikan yang akan dilaksanakan. Kegiatan penyusunan rencana biaya program sekolah dibentuk tim work penyusunan program sekolah yang terdiri dari pimpinan sekolah, perwakilan guru dan tenaga administrasi yang merupakan pengelola kegiatan dan komite sekolah. Penyusunan rencana program didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Pembiayaan pendidikan di sekolah ini dilaksanakan untuk membiayai berbagai program yang menjadi prioritas, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua program dan sub program bisa didanai karena alasan kekurangan dana namun menurut para guru

- dana yang ada sebenarnya cukup tapi kepala sekolah kurang transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang menyebabkan sebagian program yang dikatakan tidak bisa dibiayai, sebenarnya bisa dibiayai dengan dana yang ada.
3. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan dilaksanakan oleh kepala sekolah secara berkala setiap bulan bagi bendahara dan panitia yang ditunjuk untuk mengelola dana, tim monitoring dari sumber dana yang masuk baik dana BOS, pendamping dan dana block grant, serta dari inspektorat dan BPKP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2009. *Rencana Strategis Depdiknas 2009-2014*.
- Duncan, J. 1999. *Management*. Alabama, USA: Random House.
- Gay, L. R dan Airasian, P. 2000. *Educational Research*. New Jersey, USA: Prentice Hall.
- Gaffar, Fakry. 1998. *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*. Jakarta: Depdikbud.
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE.
- Kambey, Daniel C. 2006. *Landasan Teori Administrasi Dan Manajemen*. Universitas Negeri Manado.
- M. Widjayakusuma Karebet, dkk. 2002. *Pengantar Manajemen Syari'ah*. Cet.1. Jakarta: Khairul Bayan.
- M. Sukmono, Karangan Dalam Majalah. *Manajemen dan Usahawan*, FEUI, No. 2/XXI/92.
- Margono, S. 1996. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Moleong L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVI, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh. Idochi Anwar. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
- Nanang Fattah. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. Rosdakarya.
- Nasution, S., 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Siagian, S.P., 2001. *Filsafat Administrasi*, Cet ke 3 Jakarta; Gunung Agung.
- Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata dan Syaodih, Nana. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Terry, George R. & Leslie W. Rue. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara.  
UU No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV. Eko Jaya.